

SALINAN KEPUTUSAN

**PEMBUKAAN & PENEGRIAN SEKOLAH
SMAN 1 LIGUNG, KAB. MAJALENGKA, PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 13a/O/1998, Tanggal : 29-01-1998.

Oleh Menteri Pendidikan & Kebudayaan : Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

II. PROPINSI JAWA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan penergerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

Q.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

2.

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Persetujuan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Negara dengan surat Nomor B-69/E/1998;

Memperhatikan

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TALIUN PELAJARAN 1996/1997

Menetapkan

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

2.

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997

(2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Mengaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukuan dan pengeringan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada masing-masing yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 168 buah.
2. SLB Negeri 36 buah.
3. SLTP Negeri 9.842 buah.
4. SMU Negeri 2.723 buah.
5. SMK Negeri 759 buah.

yang tersebut di 27 Propinsi di Indonesia

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttid.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

2.2

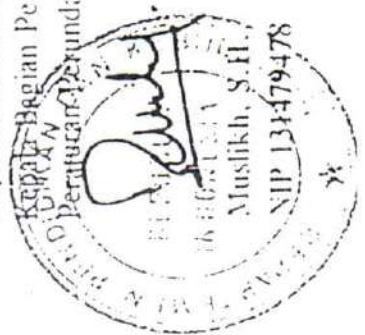
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P. T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah,
Peraturan Perundang-undangan,



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN						PENEGERIAN					JUMLAH
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	JUMLAH	TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	
1.	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	78	-	-	-	-	-	-
3.	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	78	-	-	-	-	-	-
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-
5.	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	75	-	-	-	-	-	-
6.	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	17	-	-	1	-	-	2
7.	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	2	29	-	-	1	-	-	1
8.	SUMATERA BARAT	1	-	7	6	1	15	-	-	-	-	-	-
9.	RIAU	1	1	13	5	1	21	-	-	-	1	-	1
10.	JAMBI	1	-	8	5	-	14	-	-	-	-	-	-
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	26	-	-	-	-	-	-
12.	LAMPUNG	1	-	15	6	1	23	-	-	-	-	-	-
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	17	-	-	-	-	-	-
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	-	11	-	-	-	-	-	-
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	1	15	-	-	-	-	-	-
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	-	14	-	-	-	-	-	-
17.	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-
18.	SULAWESI TENGAH	1	1	8	4	-	14	-	-	-	-	-	-
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	43	-	-	-	-	-	-
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	11	-	-	1	-	-	1
21.	MALUKU	1	-	12	4	-	17	-	-	1	-	-	1
22.	BALI	1	-	3	4	-	8	-	-	1	-	-	1
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	18	-	-	-	-	-	-
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	1	16	-	-	-	-	-	-
25.	IRIAN JAYA	1	-	9	3	2	15	-	-	-	-	-	-
26.	BENGKULU	1	-	5	3	-	9	-	-	-	-	-	-
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	1	6	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	37	6	396	168	17	614	0	0	5	2	0	7

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH		LOKASI SEKOLAH		MATA
			ASAL/INDUK	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP		
1	2	3	4	5	6		
1	DKI JAKARTA						
A.	Pembukaan	1. SLTP Negeri 282 Jakarta	—	Tanjung Priuk	Kotamadia Jakarta Utara	11.1.1.4242 11.1.1.4242 11.1.1.4242 11.1.1.4242 11.1.1.4242 11.1.1.4242 11.1.1.4242 11.1.1.4242	
		2. SMU Negeri 11 Jakarta	—	Cakung	Kotamadia Jakarta Timur	11.1.2.4251 11.1.2.4251 11.1.2.4251 11.1.2.4251 11.1.2.4251 11.1.2.4251 11.1.2.4251 11.1.2.4251	

1	2	3	4	5	6	7
2.	JAWA BARAT					
A.	Pembukaan					
		1. TK Negeri Sumber	-	Weru	Kabupaten Cirebon	11.1.1.4236.23.01.0
		2. TK Negeri Karawang	-	Karawang	Kabupaten Karawang	11.1.1.4236.23.01.0
		3. TK Negeri Cileunyi	-	Cileunyi	Kabupaten Bandung	11.1.1.4236.23.01.0
		4. SLTP Negeri 3 Citeureup	-	Citeureup	Kabupaten Bogor	11.1.1.4242.23.01.0
		5. SLTP Negeri 2 Serang	-	Serang	Kabupaten Bekasi	11.1.1.4242.23.01.0
		6. SLTP Negeri 3 Lemahabang	-	Lemahabang	Kabupaten Pekas	11.1.1.4242.23.01.0
		7. SLTP Negeri 2 Pebayuran	-	Pebayuran	Kabupaten Bekasi	11.1.1.4242.23.01.0
		8. SLTP Negeri 1 Cilengkrang	-	Cilengkrang	Kabupaten Bandung	11.1.1.4242.23.01.0
		9. SLTP Negeri 2 Cipeundeuy	-	Cipeundeuy	Kabupaten Bandung	11.1.1.4242.23.01.0
		10. SLTP Negeri 6 Banjar	-	Banjar	Kota Administratif Banjar Kabupaten Ciamis	11.1.1.4242.23.01.0
		11. SLTP Negeri 1 Karangpawitan	-	Karangpawitan	Kabupaten Ciamis	11.1.1.4242.23.01.0

12. SLTP Negeri 3 Pangandaran	-	Pangandaran	Kabupaten Ciamis	7
13. SLTP Negeri 1 Purwaharja	-	Purwaharja	Kabupaten Ciamis	
14. SLTP Negeri 2 Cinaurbeuti	-	Cinaurbeuti	Kabupaten Ciamis	
15. SLTP Negeri 4 Padaherang	-	Padaherang	Kabupaten Ciamis	
16. SLTP Negeri 2 Beber	-	Beber	Kabupaten Cirebon	
17. SLTP Negeri 2 Kadupandak	-	Kadupandak	Kabupaten Cianjur	
18. SLTP Negeri 2 Tanggeung	-	Tanggeung	Kabupaten Cianjur	
19. SLTP Negeri 2 Banyuresmi	-	Banyuresmi	Kabupaten Garut	
20. SLTP Negeri 3 Limbangan	-	Limbangan	Kabupaten Garut	
21. SLTP Negeri 2 Karangpawitan	-	Karangpawitan	Kabupaten Garut	
22. SLTP Negeri 3 Pakenjeng	-	Pakenjeng	Kabupaten Garut	

1	2	3	4	5	6	7
		23. SLTP Negeri 2 Bangodua	-	Bangodua	Kabupaten Indramayu	
		24. SLTP Negeri 3 Sliyeg	-	Sliyeg	Kabupaten Indramayu	
		25. SLTP Negeri 2 Kroya	-	Kroya	Kabupaten Indramayu	
		26. SLTP Negeri 2 Garawangi	-	Garawangi	Kabupaten Kuningan	
		27. SLTP Negeri 3 Jalaksana	-	Jalaksana	Kabupaten Kuningan	
		28. SLTP Negeri 3 Ciwaru	-	Ciwaru	Kabupaten Kuningan	
		29. SLTP Negeri 4 Rengasdengklok	-	Rengasdengklok	Kabupaten Karawang	
		30. SLTP Negeri 2 Pangkalan	-	Pangkalan	Kabupaten Karawang	
		31. SLTP Negeri 4 Telukjambe	-	Telukjambe	Kabupaten Karawang	
		32. SLTP Negeri 2 Cikurur	-	Cikurur	Kabupaten Lebak	
		33. SLTP Negeri 2 Cimarga	-	Cimarga	Kabupaten Lebak	
		34. SLTP Negeri 3 Lemahsugih	-	Lemahsugih	Kabupaten Majalengka	

1	2	3	4	5	6
		47. SLTP Negeri 2 Kragilan	-	Kragilan	Kabupaten Serang
		48. SLTP Negeri 2 Gegerbitung	-	Gegerbitung	Kabupaten Sukabumi
		49. SLTP Negeri 2 Parungkuda	-	Parungkuda	Kabupaten Sukabumi
		50. SLTP Negeri 2 Cadasgampar	-	Cadasgampar	Kabupaten Sumedang
		51. SLTP Negeri 12 Sumedang	-	Sumedang	Kabupaten Sumedang
		52. SLTP Negeri 2 Tomo	-	Tomo	Kabupaten Sumedang
		53. SLTP Negeri 4 Cimalaka	-	Cimalaka	Kabupaten Sumedang
		54. SLTP Negeri 3 Tanjungsari	-	Tanjungsari	Kabupaten Sumedang
		55. SLTP Negeri 4 Tanjungsari	-	Tanjungsari	Kabupaten Sumedang
		56. SLTP Negeri 3 Pegaden	-	Pegaden	Kabupaten Subang
		57. SLTP Negeri 3 Purwadadi	-	Purwadadi	Kabupaten Subang
		58. SLTP Negeri 2 Cikatomas	-	Cikatomas	Kabupaten Tasikmalaya
		59. SLTP Negeri 3 Leuwisari	-	Leuwisari	Kabupaten Tasikmalaya

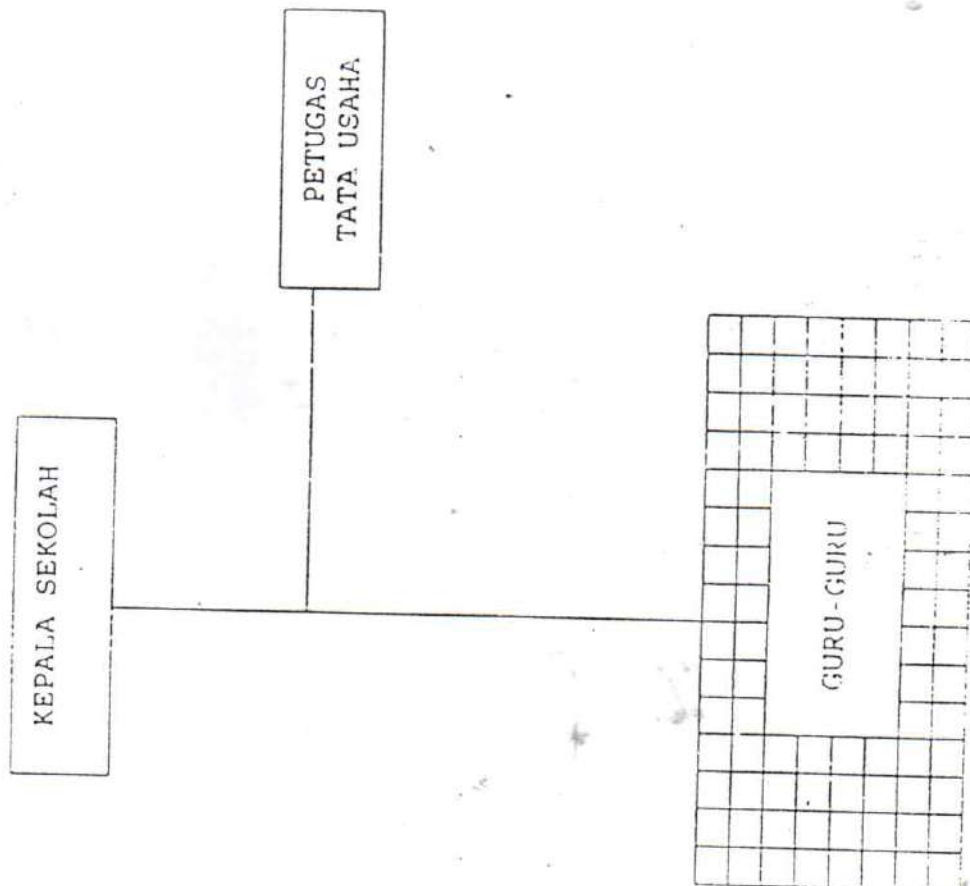
1	2	3	4	5	6	7
		60. SMU Negeri 1 Citeureup	-	Citeureup	Kabupaten Bogor	11.1.2.4251.23.01.02.511
		61. SMU Negeri 1 Ciampea	-	Ciampea	Kabupaten Bogor	11.1.2.4251.23.01.02.512
		62. SMU Negeri 1 Cipeundeuy	-	Cipeundeuy	Kabupaten Bandung	11.1.2.4251.23.01.02.513
		63. SMU Negeri 1 Pamarican	-	Pamarican	Kabupaten Ciamis	11.1.2.4251.23.01.02.521
		64. SMU Negeri 1 Padaherang	-	Padaherang	Kabupaten Ciamis	11.1.2.4251.23.01.02.522
		65. SMU Negeri 1 Karangsembung	-	Karangsembung	Kabupaten Cirebon	11.1.2.4251.23.01.02.523
		66. SMU Negeri 1 Samarang	-	Samarang	Kabupaten Garut	11.1.2.4251.23.01.02.525
		67. SMU Negeri 1 Kertasemaya	-	Kertasemaya	Kabupaten Indramayu	11.1.2.4251.23.01.02.535
		68. SMU Negeri 1 Ciniru	-	Ciniru	Kabupaten Kuningan	
		69. SMU Negeri 1 Pedes	-	Pedes	Kabupaten Karawang	
		70. SMU Negeri 1 Ligung	-	Ligung	Kabupaten Majalengka	
		71. SMU Negeri 1 Darangdan	-	Darangdan	Kabupaten Purwakarta	

1	2	3	4	5	6	7
		72. SMU Negeri 1 Panimbang	-	Panimbang	Kabupaten Pandeglang	
		73. SMU Negeri 1 Ciracap	-	Ciracap	Kabupaten Sukabumi	
		74. SMU Negeri 1 Wado	-	Wado	Kabupaten Sumedang	
		75. SMU Negeri 1 Kalijati	-	Kalijati	Kabupaten Subang	
		76. SMU Negeri 1 Kawalu	-	Kawalu	Kabupaten Tasikmalaya	
		77. SMU Negeri 1 Cikalong	-	Cikalong	Kabupaten Tasikmalaya	
		78. SMU Negeri 1 Kresek	-	Kresek	Kabupaten Tangerang	

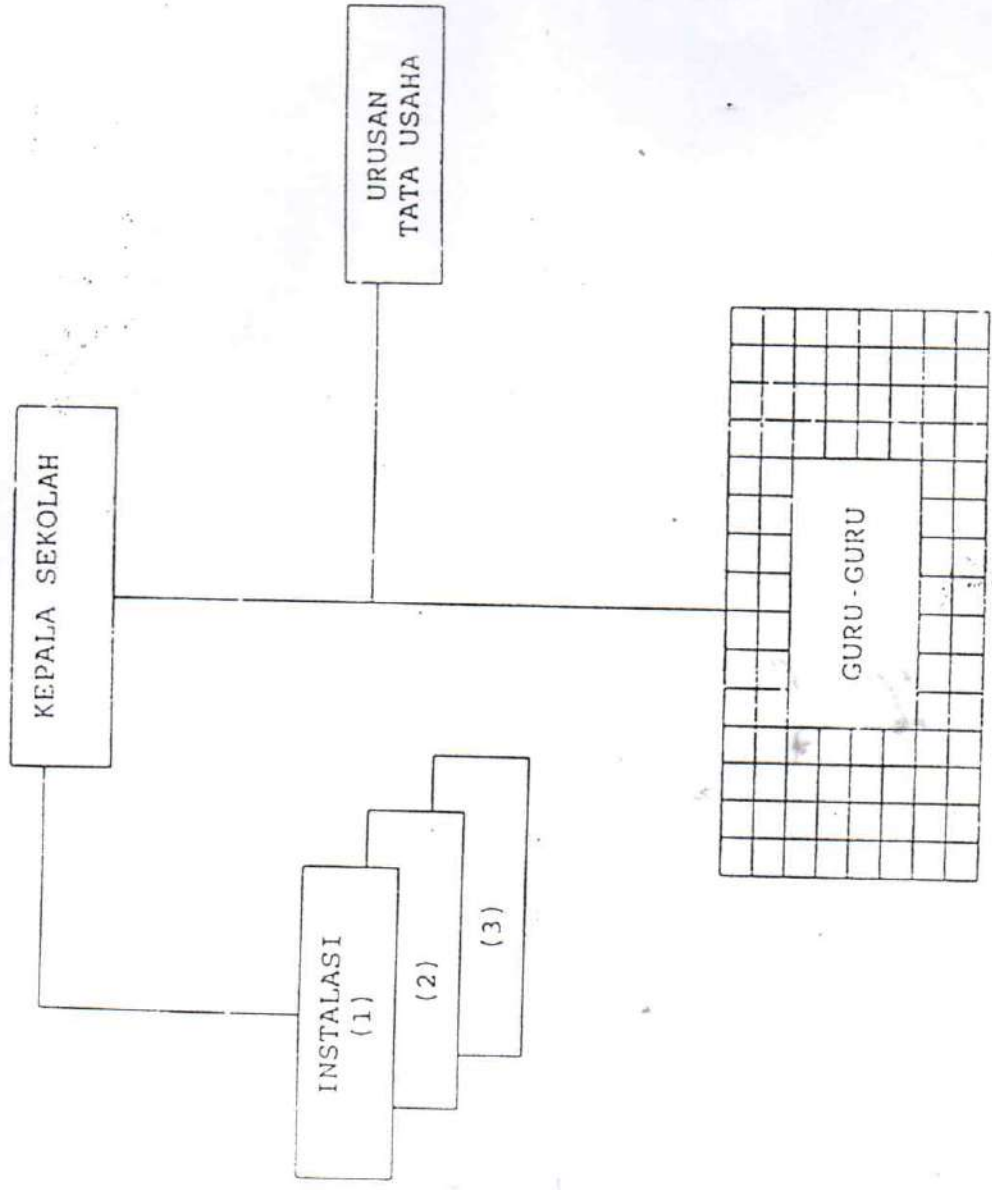
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a /O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

A. BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK

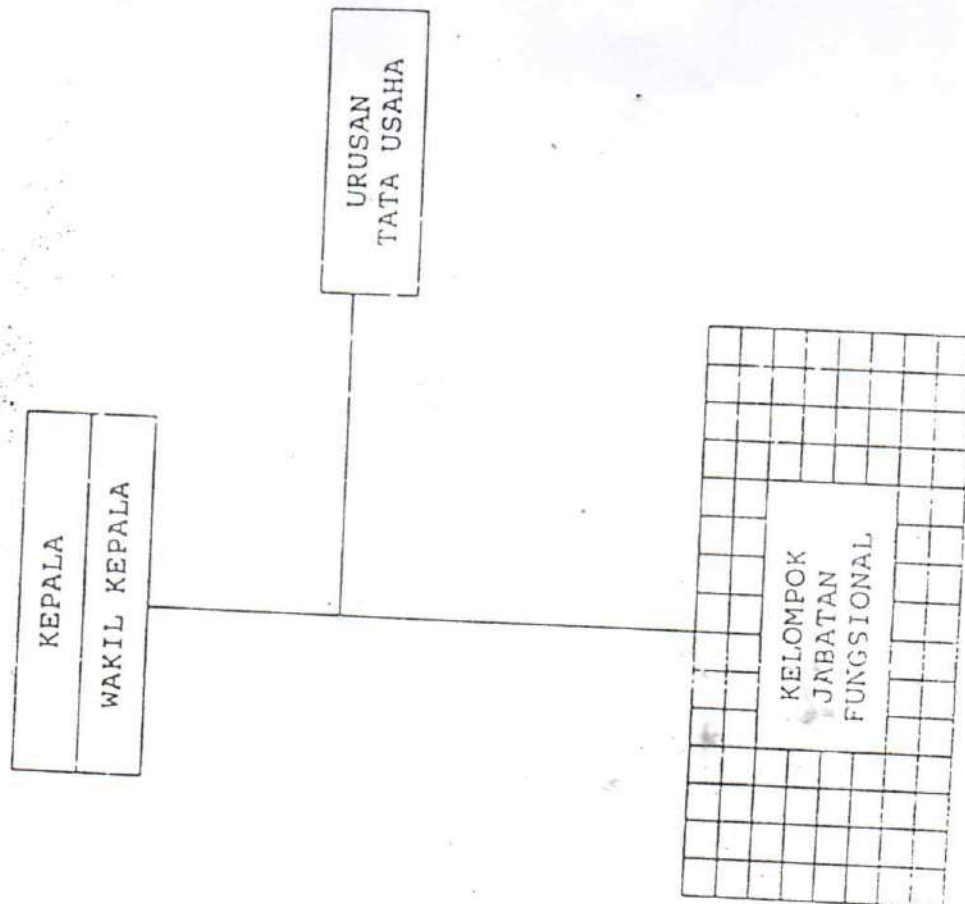


B. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LUAR BIASA



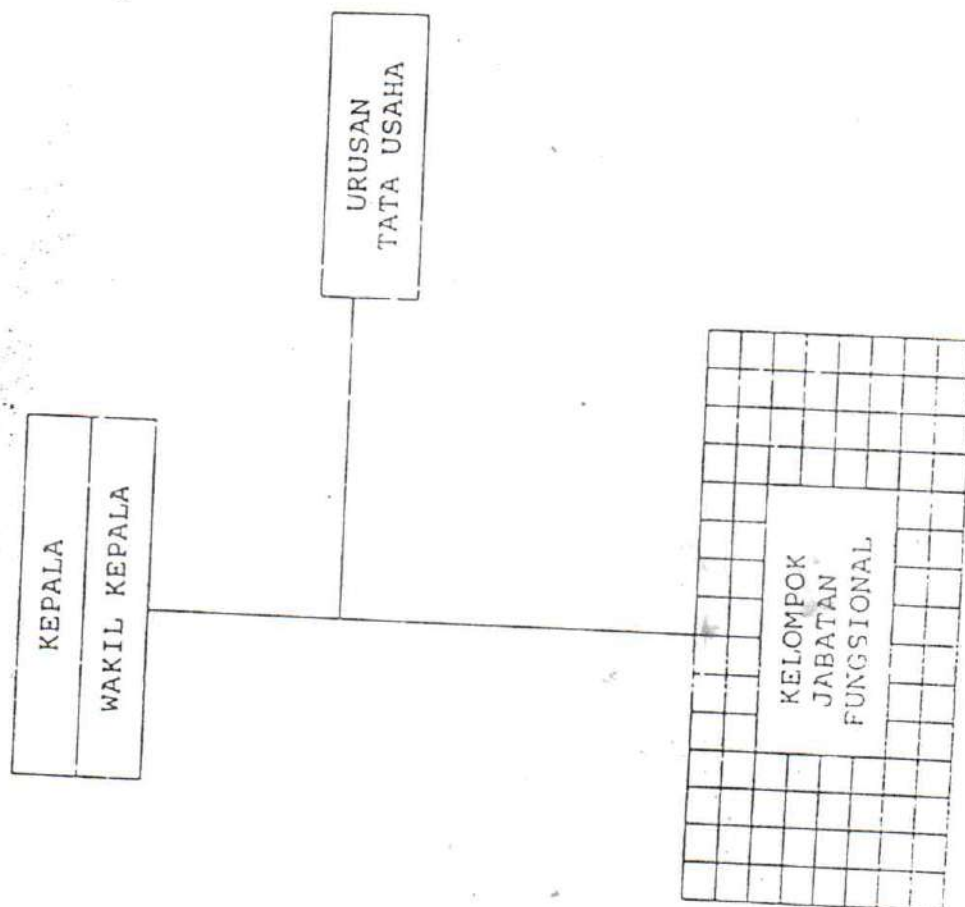
2

C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA



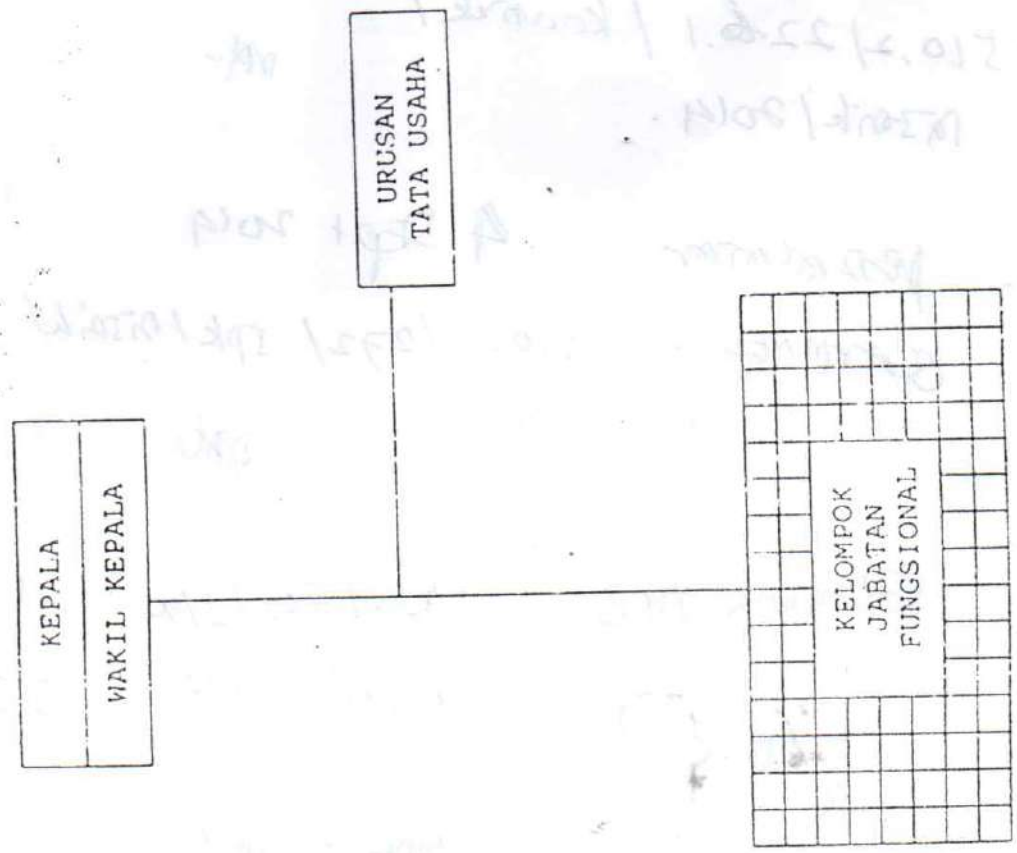
2

C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA



2

D. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM



Q